

**MANAJEMEN RISIKO BENCANA BERBASIS MASYARAKAT OLEH
PALANG MERAH INDONESIA DI DESA SIRUKEM KECAMATAN
KALIBENING KABUPATEN BANJARNEGARA**



**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Untuk memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh
Rakhmat Nur Ilmi
NIM 14250007

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-780/Un.02/DD/PP.00.9/09/2020

Tugas Akhir dengan judul : MANAJEMEN RISIKO BENCANA BERBASIS MASYARAKAT OLEH PALANG MERAH INDONESIA DI DESA SIRUKEM KECAMATAN KALIBENING KABUPATEN BANJARNEGARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAKHMAT NUR ILMI
Nomor Induk Mahasiswa : 14250007
Telah diujikan pada : Kamis, 02 Juli 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Noorkamilah, S.Ag.,M.Si
SIGNED

Valid ID: 5f50a082f27b9



Pengaji II

Dr. H. Zainudin, M.Ag.
SIGNED



Pengaji III

Abidah Muflihat, S.Th.I., M.Si
SIGNED

Valid ID: 5f2be566345cc

Valid ID: 5f4fa792a6aad



Yogyakarta, 02 Juli 2020

UIN Sunan Kalijaga

Plt. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.

SIGNED

Valid ID: 5f6c8afe3a8f3

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rakhmat Nur Ilmi
NIM : 14250007
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul Manajemen Risiko Bencana Berbasis Masyarakat Oleh Palang Merah Indonesia di Desa Sirukem, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun bersedia bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Juli 2020

Yang Menyatakan,



Rakhmat Nur Ilmi

14250007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas nikmat dan karunia Allah SWT, karya ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya, Bapak Rochmatullah dan Ibu Nur Ani, yang senantiasa mendoakan dengan sepenuh hati.
2. Kakak saya Latantsa Fikri S.Kep.,Ners. yang baik hati dan saudara kembar saya Aulia Naufal Afif, S.Kom yang tidak kalah baik hati pula.
3. Almamater Prodi Ilmu Kesejateraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



MOTTO

“Bisa karena terbiasa”



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Sholawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya bagi umat Islam di seluruh dunia.

Skripsi ini berjudul **“Manajemen Risiko Bencana Berbasis Masyarakat Oleh Palang Merah Indonesia di Desa Sirukem Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Saya menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucap terimakasih kepada:

1. Dr. Nurjanah, M. Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian ini.
2. Andayani, SIP, MSW selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan izin melaksanakan penelitian ini.
3. Dr. H. Zainudin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing selama masa perkuliahan dari semester awal hingga saya menyelesaikan tugas akhir.

4. Noorkamilah, S.Ag.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah banyak meluangkan banyak waktu dan pemikiran untuk membimbing saya hingga akhir.
5. Dosen-dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan banyak ilmu dan wawasan selama perkuliahan.
6. Palang Merah Indonesia Kabupaten Banjarnegara, Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat dan Masyarakat Desa Sirukem yang telah membimbing dan memberikan informasi kepada kami selama di lapangan.
7. Keluarga besar Difikom Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Secara khusus mas Halim, mas Oji, mbak Khoir, mbak Erlita, mbak Nisa, Azmi yang mengajari saya fotografi dan desain grafis.
8. Kelompok KKN Dukuh Sindon, Kokap, Kabupaten Kulon Progo yang penuh drama. Secara khusus untuk Nata dan Tika yang masih menjaga komunikasi sampai sekarang.
9. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang mempercayai saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Aviqa Vairiza Nailuvar, Niswah Qonita, Teguh Setiyadi, Emy Rosiana, Malik Suryatama, Wahyu Sekar, Arizka Endah, Nur Fajarini, Unggul Wicaksono, Ragil Setiawan, Refaldi Tegar, Dimas Setia Darmawan.
10. Mas Alwan Rifai yang membimbing dan mengajari saya keterampilan dasar sebagai jurnalis.

11. Rahadatul ‘Aisy teman dan sahabat hidup yang menghabiskan banyak waktu untuk bertukar pikiran bersama dan selalu mendorong saya untuk tidak pernah menyerah menghadapi apapun.

12. Untuk keluarga saya yang sangat luar biasa, Bapak, Ibu, Mas Kiki, kembaran saya Afif yang selama ini memberikan begitu banyak kebaikan-kebaikan, kasih sayang, dukungan material hingga membuat saya seperti sekarang ini.

13. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang kalian beri dan lakukan kepada saya selama ini kelak mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Sayapun berharap, skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Terimakasih

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Banjarnegara, 2 Juli 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Rakhmat Nur Ilmi

NIM. 14250007

ABSTRAK

Kabupaten Banjarnegara merupakan satu dari sekian kabupaten di Jawa Tengah yang berada di zona merah bencana. Salah satu wilayah yang yang terbilang rawan yakni Desa Sirukem. Hal yang membuat desa ini rawan bencana yakni, secara geografis Sirukem berada di wilayah dengan kontur perbukitan curam. Terlebih lagi masih kurangnya kesadaran masyarakat akan bencana.. Untuk menghadapi situasi tersebut Palang Merah Indonesia (PMI) kabupaten Banjarnegara melaksanakan program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat (KBBM). Program KBBM diterapkan agar masyarakat dapat secara mandiri menghadapi potensi bencana yang terdapat di wilayahnya sehingga dapat meminimalisir dampak yang terjadi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses-proses manajemen risiko yang dilakukan dalam program kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat oleh Palang Merah Indonesia Kabupaten Banjarnegara di Desa Sirukem. Kemudian untuk mengetahui faktor pendukung dan hambatan-hambatan yang terjadi selama berjalannya program KBBM di Desa Sirukem. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek dalam penelitian ini berjumlah enam orang diantaranya, Humas PMI Banjarnegara, Ketua Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Sibat), Penasehat Tim Sibat, Sekretaris Desa Sirukem, dan dua orang warga Desa Sirukem. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam program KBBM Palang Merah Indonesia kegiatan manajemen risiko bencana berbasis masyarakat di Sirukem berfokus pada situasi terdapat potensi bencana. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana yang melibatkan masyarakat desa setempat.

Kata kunci: PMI, Manajemen Risiko Bencana, Bencana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teori.....	10
1. Pengertian Bencana	10
2. Manajemen Bencana	11
3. Manajemen Risiko Bencana.....	13
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematikan Pembahasan	32

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Palang Merah IndonesiaKabupaten Banjarnegara	34
1. Palang Merah Indonesia Kabupaten Banjarnegara	34
2. Visi dan Misi.....	35
3. Pelayanan PMI Banjarnegara	35

4. Program Kerja PMI Banjarnegara.....	37
5. Struktur Organisasi PMI Banjarnegara	39
6. Inventaris Aset PMI Banjarnegara	40
B. Gambaran Umum Desa Sirukem	41
1. Letak Geografis Desa Sirukem	41
2. Data Kependudukan dan Pendidikan	42
3. Mata Pencaharian Masyarakat Sirukem.....	43
4. Struktur Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat	44
5. Kondisi Masyarakat Saat Terjadi Bencana Gempa Lokal	46
6. Potensi Bencana di Desa Sirukem.....	47
7. Dibentuknya Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat	48
BAB III MENGHADAPI RISIKO BENCANA DI DESA SIRUKEM	
A. Manajemen Risiko Pada Situasi Terdapat Potensi Bencana	50
1. Kesiapsiagaan.....	50
a. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana.....	50
b. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini.....	52
c. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar	53
d. Pengorganisasian, penyuluhan pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat.....	55
e. Penyiapan lokasi evakuasi	63
f. Penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana.....	64
g. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.....	68
2. Peringatan Dini.....	69
a. Pengamatan gejala bencana.....	69

b.	Analisis hasil pengamatan gejala bencana	71
c.	Pengambilan keputusan oleh pihak berwenang	73
d.	Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana...	74
e.	Pengambilan tindakan oleh masyarakat	75
3.	Mitigasi Bencana.....	76
a.	Mitigasi struktural	77
b.	Mitigasi non-struktural.....	79
B.	Faktor-faktor Pendukung Berjalannya Program Kesiapsiagaan Bencana di Desa Sirukem	85
1.	Komunikasi	85
2.	Sumber Daya.....	85
3.	Kerjasama Pihak Luar	86
C.	Hambatan-hambatan Berjalannya Program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat di Desa Sirukem	86
1.	Hambatan Geografis.....	87
2.	Hambatan Komunikasi.....	88
3.	Hambatan Sumber Daya Manusia.....	88
a.	Kurangnya kesadaran masyarakat	88
b.	Terbatasnya anggota PMI Banjarnegara dengan kompetensi KBBM	89
c.	Sebagian kecil masyarakat menolak program KBBM	89
d.	Kurangnya keterlibatan Pemerintah Desa Sirukem	89
BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan	91
B.	Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA		95

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Program Kerja PMI Banjarnegara.....	37
Tabel 2	Inventaris aset PMI Banjarnegara	40
Tabel 3	Pendidikan Masyarakat Desa Sirukem.....	43
Tabel 4	Mata Pencaharian Penduduk Desa Sirukem.....	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Jumlah kejadian bencana di Indonesia.....	1
Gambar 2	Struktur Organisasi PMI Banjarnegara.....	39
Gambar 3	Peta Kecamatan Kalibening.....	42
Gambar 4	Struktur Organisasi Tim Sibat Desa Sirukem	44
Gambar 5	Forum Pengurangan Risiko Bencana di Banjarnegara	51
Gambar 6	Penerimaan Logistik Gudang PMI Banjarnegara	55
Gambar 7	Kegiatan Pengorganisasian dan Pelatihan Tim Sibat Desa Sirukem	57
Gambar 8	Kegiatan Sosialisasi Tim Sibat kepada Masyarakat	58
Gambar 9	Kegiatan Simulasi Bencana Desa Sirukem.....	62
Gambar 10	Prosedur Tanggap Darurat Bencana	67
Gambar 11	Format Assessment Cepat.....	72
Gambar 12	Kerja Bakti Penanganan Longsoran	76
Gambar 13	Pelatihan Tim Sibat Desa Sirukem	81

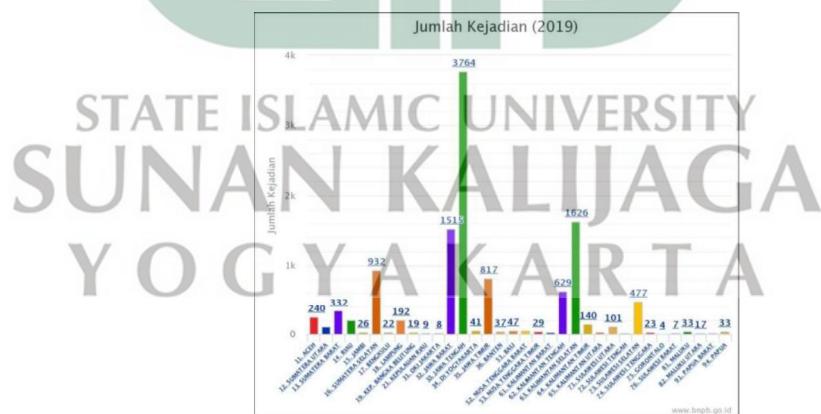
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan 9.391 kejadian bencana telah terjadi selama kurun waktu 2019. Hal ini mengakibatkan 911 orang meninggal, 2.163 orang luka-luka, 5.371.345 mengungsi dan ribuan rumah serta ratusan fasilitas umum mengalami kerusakan. Bencana yang tersebar di 34 provinsi tersebut terdiri dari tanah longsor, banjir, puting beliung, kebakaran hutan, dan gempa bumi. BNPB juga mencatat Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling sering dilanda bencana, dengan total 3.764 kejadian.¹ Salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang menjadi langganan bencana ialah Banjarnegara.²

Gambar 1 Jumlah Kejadian Bencana di Indonesia



Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB Tahun 2019

¹ Data Informasi Bencana Indonesia <https://dibi.bnppb.cloud/> diakses pada tanggal 6 Januari 2020

Kabupaten Banjarnegara merupakan satu dari sekian kabupaten yang berada di zona merah rawan bencana. Minimarketnya bencana kata orang, berbagai macam bencana ada di daerah ini. Potensi bencana yang ada di Banjarnegara berupa tanah longsor, gempa bumi, banjir, angin puting beliung sampai bencana yang sifatnya khas seperti kepulan asap kawah beracun senantiasa mengintai penduduk Banjarnegara.³

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) dikutip oleh Soehatman Ramli, bencana adalah suatu kejadian ekstrem dalam lingkungan alam atau manusia yang berakibat merugikan dan mempengaruhi kehidupan manusia, harta benda atau aktivitas sampai pada tingkat yang menimbulkan bencana.⁴ Seperti halnya yang terjadi pada tahun 2015, bencana gempa bumi lokal terjadi Desa Sirukem, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara membuat ribuan warga harus mengungsi ke desa tetangga. Meski tidak berdampak secara signifikan, tetap saja warga merasa cemas mengingat bencana besar yang pernah terjadi sebelumnya di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Karangkobar pada tahun 2014.

Desa Sirukem sendiri memang memiliki wilayah dengan kontur perbukitan curam, ditambah masih rendahnya budaya sadar bencana yang dimiliki masyarakat Sirukem. Perilaku masyarakat Sirukem yang dapat

³ <http://dprd-banjarnegara.go.id/banjarnegara-terkepung-bencana/> diakses tanggal 18 November 2019.

⁴ Soehatman Ramli, *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. 10.

meningkatkan kerentanan di antaranya pembuatan *blumbang*.⁵ Blumbang ini dibuat di atas lahan terasiring yang dapat memicu risiko terjadinya tanah longsor. Adanya aktivitas penebangan kayu yang tidak dibarengi dengan penanaman bibit baru juga masih banyak ditemui di Sirukem. Kemudian masih didapatnya pembukaan lahan pertanian di lokasi yang rawan bencana.

Kini sudah tahun 2020, Desa Sirukem telah berbenah dengan menyiapkan diri mengikuti sejumlah program mitigasi bencana baik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun Palang Merah Indonesia (PMI) dengan program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat (KBBM). PMI Banjarnegara yang menjadi subjek penelitian ini sedikitnya telah menyelenggarakan program KBBM di sembilan desa dan membentuk tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Sibat). Sembilan desa tersebut yakni, di Desa Sumberejo, Pekasiran, Kepakisan, Majasari, Sokaraja, Kertosari, Lawen, Duren dan Sirukem yang seluruhnya terdapat potensi bencana.⁶

KBBM merupakan program yang dilaksanakan oleh relawan PMI sebagai inisiatif dengan melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mengambil tindakan dalam mengurangi dampak bencana yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Program ini bersifat partisipatif dan

⁵ *Blumbang* merupakan kolam ikan dalam bahasa setempat.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Alwan Rifai selaku Humas Palang Merah Indonesia Cabang Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 23 September 2019 pukul 12.47 WIB.

merupakan salah satu langkah mitigasi yang diarahkan pada pengurangan kerentanan fisik, lingkungan, kesehatan dan sosial ekonomi. Program KBBM ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Sehingga bila terjadi bencana masyarakat minimal dapat menyelamatkan diri sendiri atau bahkan masyarakat di lingkungan sekitarnya.⁷

Program ini sendiri dalam pelaksanaannya menawarkan sudut pandang yang berbeda ketimbang penyediaan pelayanan darurat saat terjadi bencana (pencarian, penyelemanan, distribusi bantuan, pelayanan kesehatan dan dukungan psikologi sosial serta evakuasi). Di mana respons terhadap situasi tanggap darurat dengan distribusi bantuan dapat berdampak pada ketergantungan masyarakat. Melalui program KBBM masyarakat dapat terlibat aktif di dalam keseluruhan proses penanganan bencana, mulai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi.⁸

Dalam menjalankan KBBM di Desa Sirukem, relawan PMI Banjarnegara bekerjasama dengan banyak pihak seperti BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan aparat pemerintahan desa serta *Korean Red Cross Gyeonam*. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa program KBBM ini tidaklah berdiri sendiri, namun menjadi bagian yang tidak terpisah dari

⁷ Palang Merah Indonesia, *Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat*, (Jakarta: Palang Merah Indonesia Pusat, 2007), hlm. 3.

⁸ Palang Merah Indonesia, ibid., hlm. 7-8

proses manajemen bencana dan penanggulangan bencana secara keseluruhan.⁹

Aktivitas berjalannya kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat tersebut tentu tidak lepas dari keikutsertaan relawan yang terlibat dari awal hingga berakhirnya program. Peran serta relawan begitu penting dalam setiap program yang dimiliki PMI sebagai organisasi pelayanan sosial. Selain karena relawan merupakan ujung tombak kegiatan, mereka lah yang paling sering berinteraksi dengan masyarakat yang mendapat manfaat dari program-program yang ada. Karena jika berbicara mengenai sumber daya manusia dalam organisasi pelayanan sosial, paling tidak terdiri dari tiga komponen yaitu dewan direksi (*board management*), staf pelaksana dan para relawan (*volunteer*).¹⁰

Relawan dalam penelitian ini menempati peranan sentris sebagai aktor di balik penerapan manajemen risiko bencana berbasis masyarakat di Desa Sirukem. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian Manajemen Risiko Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat oleh Palang Merah Indonesia di Desa Sirukem Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. Selain karena keberlangsungan programnya masih terus dijaga, relawan yang tergabung dalam tim Sibat tidak jarang melibatkan diri dalam situasi tanggap darurat yang terjadi di desa lain.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Alwan Rifai selaku Humas Palang Merah Indonesia Cabang Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 23 September 2019 pukul 12.47 WIB.

¹⁰ Santoso T. Raharjo, *Manajemen Relawan Pada Organisasi Pelayanan Sosial*, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 4, No. 3 November 2010, hlm. 3. <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5299/2662>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen risiko dalam program kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat oleh Palang Merah Indonesia (PMI) di Desa Sirukem, Kecamatan Kalibening?
2. Apa saja faktor pendukung dan hambatan-hambatan yang dialami relawan Palang Merah Indonesia dalam program kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat di Desa Sirukem, Kecamatan Kalibening?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui manajemen risiko dalam program kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat oleh relawan Palang Merah Indonesia Cabang Banjarnegara di Desa Sirukem, Kecamatan Kalibening.
2. Mengetahui faktor pendukung dan hambatan-hambatan yang dialami relawan Palang Merah Indonesia dalam program kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat di Desa Sirukem.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberi wawasan baru seputar penanganan kebencanaan.
2. Penelitian ini secara teoritis dapat digunakan sebagai salah satu rujukan bagi akademisi maupun praktisi di lapangan kaitannya dengan penanganan kebencanaan.

3. Penelitian ini juga dapat diambil manfaat secara praktis berupa kontribusi pemikiran kaitannya dengan evaluasi penanganan bencana yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia Cabang Banjarnegara.

E. Tinjauan Pustaka

Secara umum penelitian ini membahas tentang manajemen risiko dalam kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat yang dilakukan PMI Banjarnegara di Desa Sirukem, sehingga untuk mengetahui keaslian dari penelitian ini, maka peneliti mencari dan menemukan beberapa tinjauan pustaka yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

Pertama, penelitian Tiyas Trirahayu dengan Judul “*Manajemen Bencana Erupsi Gunung Merapi Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman*”.¹¹ Dalam penelitian tersebut digunakan beberapa kajian teori diantaranya kebijakan publik, bencana, gunung api, dan manajemen. Kajian kebijakan publik digunakan karena memiliki korelasi dengan proses manajemen bencana yang menyangkut hidup orang banyak dalam suatu wilayah. Adapun kajian teoritis tentang manajemen bencana menggunakan kajian yang bersumber dari Arie Priambodo. Dalam kajian tersebut disebutkan sistem tanggap bencana meliputi empat tahapan yakni, *mitigation* (pengurangan-pencegahan), *preparedness* (perencanaan-persiapan), *response* (penyelaman-pertolongan), *recovery* (pemulihan-pengawasan). Kemudian selanjutnya hasil dalam penelitian

¹¹ Tiyas Trirahayu, *Implementasi Program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

tersebut menunjukkan bahwa dalam menghadapi erupsi gunung merapi BPBD Kab. Sleman telah melaksanakan tahapan manajemen bencana yaitu *mitigation* dengan membuat talud banjir, kantong lahar, *Early Warning System* dan rambu evakuasi, *preparedness* dengan melakukan pemantauan Gunung Merapi, simulasi erupsi, membentuk sekolah siaga bencana, desa tangguh bencana dan *sister school*. Tahap *respons* dengan membuat skenario rencana evakuasi, pelatihan pengelolaan barak dan dapur umum. Dan *recovery* meliputi pembangunan huntap, pemulihian infrastruktur, penggantian ternak dan bantuan sapi perah dengan pengawasan dari BPBD setempat.

Kedua, penelitian Deski Irandi dengan Judul “*Implementasi Program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta*”.¹² Dalam penelitian tersebut program kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat telah diterapkan di dua kelurahan. Pertama di kelurahan Prenggan karena memiliki latar belakang daerah yang rentan terhadap bahaya penyakit. Kedua di Kelurahan Bener yang memiliki latar belakang daerah dilalui aliran Sungai Winongo yang kerap kali meluap pada musim penghujan. Dari penelitian yang dilakukan Deski Irandi, peneliti menyadari bahwa program KBBM ini bukan saja berbicara mengenai mitigasi bencana.

¹² Deski Irandi, *Implementasi Program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Ketiga, penelitian Amni Zarkasyi Rahman dengan Judul “*Kajian Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara*”.¹³

Penelitian ini mengamati strategi mitigasi bencana tanah longsor yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara. Hasil penelitian menyebutkan bahwa mitigasi bencana tanah longsor di Banjarnegara dilakukan secara struktural dan non struktural. Mitigasi struktural dilakukan dengan penyusunan *database* daerah potensi bahaya dan pemasangan *Early Warning System* (EWS). Sedangkan mitigasi non struktural dilakukan dengan pemberian informasi, sosialisasi serta pelatihan dan simulasi bencana. Adapun upaya yang telah dilakukan BPBD Banjarnegara untuk meningkatkan efektivitas mitigasi bencana yakni dengan cara membentuk masyarakat tangguh serta desa tangguh bencana.

Berdasarkan seluruh kajian pustaka di atas maka penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dibandingkan tinjauan pustaka di atas, penelitian ini akan memiliki nilai tawar yang menarik karena mengulas sisi manajemen risiko di dalam program kesiapsiagaan bencana milik PMI dilaksanakan Desa Sirukem. Karena sepengetahuan peneliti belum ada penelitian yang mengulas tentang hal tersebut di Banjarnegara.

¹³ Amni Zarkasyi Rahman, *Kajian Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara*, Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, Vol. 1, No. 1 Oktober 2015, hlm. 1-14.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Bencana

a. Pengertian Bencana

Kata bencana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan kesusahan, kerugian, penderitaan, malapetaka, kecelakaan, dan marabahaya.¹⁴ Menurut Murdiyanto bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang menyebabkan gangguan serius pada masyarakat, sehingga menyebabkan korban jiwa serta kerugian yang meluas pada kehidupan manusia, baik dari segi material, ekonomi maupun lingkungan dan melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki.¹⁵

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa yang dimaksud dengan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya, korban jiwa manusia, kerusakan

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 115.

¹⁵ Murdiyanto, *Bencana Alam dan Penanggulangannya (Kajian Beberapa Peristiwa Bencana Alam di Kota Jayapura dan Penanggulangannya)*, (Yogyakarta: Citra Media, 2014), hlm. 12.

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.¹⁶ Parker di dalam buku Bevaola Kusumasari mendefinisikan bencana sebagai sebuah kejadian alam atau kejadian hasil tangan manusia yang tidak biasa, termasuk kejadian yang disebabkan oleh kegagalan sistem teknologi yang melemahkan kapasitas respons dari komunitas manusia, kelompok individu, atau lingkungan alam dan yang menyebabkan kerusakan besar, kerugian ekonomi, kehancuran, cedera dan atau kematian.¹⁷ Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bencana merupakan suatu kejadian yang mengancam nyawa manusia baik itu menyebabkan kerusakan, hilangnya harta benda ataupun tidak.

b. Manajemen Bencana

Menurut Shaluf di dalam buku Bevaola Kusumasari manajemen bencana didefinisikan sebagai istilah kolektif yang mencangkup semua aspek perencanaan untuk merespon bencana, termasuk kegiatan-kegiatan sebelum bencana dan setelah bencana yang mungkin juga merujuk pada manajemen risiko dan konsekuensi bencana.¹⁸

Manajemen bencana tersebut meliputi lima tahap umum, yaitu:

¹⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 1 ayat (1).

¹⁷ Bevaola Kusumasari, *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*, cet. 1, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), hlm. 4.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 19.

1) Prediksi

Dalam tahap ini, kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan dilakukan.

Ini termasuk langkah-langkah yang diambil untuk membatasi dampak buruk bencana alam, degradasi lingkungan, dan bahaya teknologi.

Langkah yang diambil untuk memastikan respons yang efektif terhadap dampak bahaya bencana ialah dengan dikeluarkannya peringatan dini yang tepat waktu dan efektif serta evakuasi sementara masyarakat dan *property* dari lokasi yang terancam bencana.

2) Peringatan

Tahap ini mengacu pada penyediaan informasi yang efektif dan tepat waktu melalui lembaga-lembaga yang teridentifikasi. Lewat lembaga-lembaga ini, individu dimungkinkan untuk menghadapi bahaya dengan mengambil tindakan menghindari atau mengurangi risiko yang mereka hadapi serta mempersiapkan respons yang efektif.

3) Bantuan Darurat

Tahap ketiga merujuk pada penyediaan bantuan atau intervensi selama atau setelah bencana terjadi. Ini merupakan bantuan keselamatan dan memenuhi kebutuhan dasar mereka yang terkena dampak bencana. Hal ini dapat dilakukan segera dan dalam jangka waktu singkat atau durasi yang lama.

4) Rehabilitasi

Tahap ini meliputi keputusan dan tindakan yang diambil setelah bencana untuk memulihkan atau mengembalikan kondisi kehidupan

masyarakat yang terkena bencana seperti kondisi sebelum bencana terjadi. Disamping itu, juga diiatkan kembali dan difasilitasi semua penyesuaian yang dibutuhkan untuk mengurangi risiko bencana.

5) Rekonstruksi

Tahap ini merujuk pada pembangunan kembali kondisi kehidupan masyarakat yang telah rusak akibat bencana dengan tujuan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.¹⁹

Telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 pada Bab I pasal 3 bahwa “Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.”²⁰

Jadi jika dikerucutkan, manajemen bencana dapat dibagi tiga kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan pra bencana, meliputi kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan,
2. Kegiatan pada saat terjadi bencana, berupa kegiatan tanggap darurat,
3. Kegiatan pasca bencana, berupa pemulihan.

c. Manajemen Risiko Bencana

Manajemen Risiko diartikan sebagai seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dipunyai organisasi, untuk mengelola,

¹⁹ *ibid.*, hlm 20-21.

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bab I pasal 3

memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko.²¹

Sedangkan kata bencana memiliki definisi sebagai peristiwa atau serangkaian peristiwa yang menyebabkan gangguan serius pada masyarakat, sehingga menyebabkan korban jiwa serta kerugian yang meluas pada kehidupan manusia, baik dari segi material, ekonomi maupun lingkungan dan melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki.²² Maka dapat dipahami bahwa manajemen risiko bencana merupakan tindakan untuk mengatur atau merekayasa situasi sebelum timbulnya korban jiwa atau kerugian dan atau sebelum terjadinya bencana.

Lebih lanjut dalam siklus bencana, manajemen risiko ini terdapat pada fase pra bencana yang dilakukan melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Adapun kegiatan-kegiatan dalam risiko bencana meliputi kegiatan pada tahap pra bencana (situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi bencana).²³



²¹ Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, cet. Ketujuh, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 1.20

²² Murdiyanto, *Bencana Alam dan Penanggulangannya (Kajian Beberapa Peristiwa Bencana Alam di Kota Jayapura dan Penanggulangannya)*, (Yogyakarta: Citra Media, 2014), hlm. 12.

²³ Nurjanah dkk, *Manajemen Bencana*, (Bandung: Alfabet, 2013), hlm. 47

1) Pada Situasi Tidak Terjadi Bencana

Situasi tidak terjadi bencana yaitu kondisi suatu wilayah yang berdasarkan analisis kerawanan pada periode waktu tertentu tidak menghadapi ancaman bencana yang nyata. Pada situasi ini perlu adanya kegiatan seperti perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan ke dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, persyaratan standar teknis penanggulangan bencana, pendidikan, dan pelatihan.²⁴

a) Perencanaan Penanggulangan Bencana

Perencanaan penanggulangan bencana dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana. Hal tersebut meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, dan alokasi tugas, kewenangann, dan sumber daya yang tersedia.²⁵

b) Pengurangan Risiko Bencana

²⁴ Nurjanah dkk, *Manajemen Bencana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 47-53

²⁵ *Ibid.*, hlm . 48

Pengurangan risiko bencana dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana, yang meliputi pengenalan dan pemantauan risiko bencana, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana, dan penerapan upaya fisik, nonfisik, serta pengaturan penanggulangan bencana.²⁶

c) Pencegahan

Pencegahan merupakan langkah-langkah/kegiatan yang dilakukan untuk mencegah bencana atau risiko yang mungkin terjadi melalui pengendalian dan pengubah-sesuaian fisik dan lingkungan. Hal ini meliputi identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana, kontrol terhadap penguasaan dan pengelola sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/ atau berangsur-angsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat.²⁷

²⁶ Nurjanah dkk, *Manajemen Bencana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 51

²⁷ *Ibid.*, hlm. 52

d) Pemaduan ke Dalam Perencanaan Pembangunan

Pemaduan ke dalam perencanaan pembangunan dilakukan melalui pencatuman unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah.²⁸

e) Persyaratan Analisis Risiko Bencana

Analisis risiko bencana adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana, dan pemenuhan syarat analisis risiko bencana ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh yang berkompeten.²⁹

f) Pelaksanaan dan Penegakan Rencana Tata Ruang

Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar. Secara berkala harus dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.³⁰

²⁸ *Ibid.*, hlm. 52

²⁹ Nurjanah dkk, *Manajemen Bencana*, (Bandung: Alfabetika, 2013), hlm. 52

³⁰ *Ibid.*, hlm. 52

g) Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka menyiapkan masyarakat menghadapi bencana untuk mengurangi jatuhnya korban akibat bencana, maka dalam kurikulum pendidikan formal perlu diakomodasikan materi tentang kebencanaan/penanggulangan bencana, termasuk melakukan pelatihan dalam menghadapi kedaruratan bencana bagi masyarakat yang berada dalam wilayah yang rawan bencana.Pada situasi terdapat potensi bencana³¹

h) Persyaratan Standar Teknis Penanggulangan Bencana

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah dan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penanggulangan bencana termasuk masyarakat.³²

2) Pada Situasi Terdapat Potensi Bencana

Pada situasi ini dilakukan kegiatan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana.



³¹ Nurjanah dkk, *Manajemen Bencana*, (Bandung: Alfabetika, 2013), hlm. 52

³² *Ibid.*, hlm. 53

a) Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan adalah perkiraan-perkiraan tentang kebutuhan yang akan timbul jika terjadi bencana dan memastikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.³³

b) Peringatan Dini

Peringatan dini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan analisis data guna mengukur eskalasi bahaya, mengatur strategi/respons dan untuk bahan pengambilan keputusan terhadap kemungkinan akan segera terjadi bencana.³⁴

c) Mitigasi

Mitigasi ditujukan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Kegiatan mitigasi bencana memfokuskan perhatian pada pengurangan dampak dari ancaman sehingga akan mengurangi kemungkinan dampak negatif bencana.³⁵

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

d. Penanggulangan Bencana Pada Tahapan Pra Bencana
Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana berdasarkan UU No 24 Tahun 2007 Tentang

³³ *Ibid.*, hlm. 55

³⁴ Nurjanah dkk, *Manajemen Bencana*, (Bandung: Alfabetika, 2013), hlm. 55

³⁵ *Ibid.*, hlm. 55

Penanggulangan Bencana meliputi kegiatan dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.³⁶ Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sendiri meliputi perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.³⁷

1) Perencanaan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana
- b. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat
- c. Analisis kemungkinan dampak bencana
- d. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana
- e. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana
- f. Alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia³⁸

2) Pengurangan risiko bencana meliputi:

- a. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana
- b. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana
- c. Pengembangan budaya sadar bencana

³⁶ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 34

³⁷ Ibid., Pasal 35

³⁸ Ibid., Pasal 36 ayat (4)

- d. Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana
- e. Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.³⁹

3) Pencegahan meliputi kegiatan:

- a. Identifikasi dan pengenalan secara pasati terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana
- b. Control terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dana tau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana
- c. Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana
- d. Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
- e. Penguatan ketahanan sosial masyarakat.⁴⁰

4) Pemaduan dalam rencana pembangunan dilakukan dengan cara mencantumkan unsur unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah.⁴¹

5) Persyaratan analisis risiko bencana disusun dan ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pemenuhan syarat

³⁹ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 37 ayat (2)

⁴⁰ Ibid., Pasal 38

⁴¹ Ibid., Pasal 39

analisis risiko bencana sendiri ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.⁴²

- 6) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencangkup pemberlakuan peraturan tentang petaan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.⁴³
- 7) Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.⁴⁴

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana.

- 1) Kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana melalui kegiatan:
 - a. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana
 - b. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini,

⁴² Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 41 ayat (1) dan (2).

⁴³ Ibid., Pasal 42 ayat (1).

⁴⁴ Ibid., Pasal 43

- c. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar
 - d. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat
 - e. Penyiapan lokasi evakuasi
 - f. Penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana
 - g. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.⁴⁵
- 2) Peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat yang dilakukan melalui kegiatan:
- a. Pengamatan gejala bencana
 - b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana
 - c. Pengambilan keputusan oleh pihak berwenang
 - d. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana
 - e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat.⁴⁶
- 3) Mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana yang dilakukan melalui kegiatan:

⁴⁵ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 45 ayat (1) dan (2).

⁴⁶ Ibid., Pasal 46 ayat (1) dan (2)

- a. Pelaksanaan penataan ruang
- b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan
- c. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.⁴⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini, Manajemen Risiko Dalam Program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat Palang Merah Indonesia di Desa Sirukem, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Maka penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan. Jenis penelitian ini adalah deskripsi kualitatif yaitu berusaha mengungkapkan suatu masalah yang terjadi kemudian menganalisis informasi data yang didapat. Data tersebut dapat berupa naskah, wawancara, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.⁴⁸

Penelitian kualitatif sendiri adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selain itu penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu ilmu pengetahuan sosial yang secara

⁴⁷ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 4 ayat (1) dan (2).

⁴⁸ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 11.

fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dan pengawasannya sendiri serta berhubungan dengan orang-orang tersebut beserta adatnya.⁴⁹

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi dan situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, atau fenomena tertentu. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan manajemen risiko dalam kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat yang dilakukan oleh PMI Banjarnegara di Desa Sirukem.⁵⁰

2. Subjek dan Objek Penelitian

a) Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁵¹ Pada penelitian ini pertimbangan tersebut didasarkan pada beberapa kriteria. Kriteria yang pertama yakni kemampuan subjek penelitian dalam memberikan data atau informasi mengenai manajemen risiko bencana berbasis masyarakat di Desa Sirukem. Kedua, keterlibatan

⁴⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Putra Grafika, 2011), hlm 3.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 68

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 218.

subjek penelitian dengan program KBBM. Subjek penelitian sendiri adalah orang yang menjadi sumber informasi dalam penelitian.⁵² Adapun subjek dalam penelitian ini yakni Bapak Alwan Rifai Staf bidang hubungan masyarakat PMI Banjarnegara, Bapak Anto Ketua Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Sibat), Bapak Sugeng Penasehat Tim Sibat, Bapak Khaerunnasikin Sekretaris Desa Sirukem. Kemudian Bapak M. Badri dan Bapak Purwanto merupakan masyarakat Desa Sirukem dipilih sebagai subjek penelitian karena pernah menerima manfaat dengan berjalannya program KBBM dan berdirinya Tim Sibat di Desa Sirukem.

Adapun alasan peneliti memilih keenam informan tersebut, di samping telah memenuhi kriteria yang dibutuhkan di atas. Keenam informan tersebut telah memberi informasi yang menurut peneliti cukup sesuai dengan konteks penelitian. Dengan demikian, dari pernyataan tersebut peneliti meyakini bahwa keenam tersebut dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membantu peneliti membahas permasalahan dalam penelitian.

b) Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah masalah yang hendak diteliti yaitu manajemen risiko dalam program kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat di Desa Sirukem.

⁵² Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1998), hlm. 135.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

a) Observasi

Observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari metode-metode pengumpulan data penelitian kualitatif. Secara umum observasi adalah kegiatan pengumpulan data yang mana kegiatan tersebut berupa pengamatan suatu objek. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.⁵³

Pada penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif. Menurut Satori dan Aan observasi pasif adalah peneliti mendatangi tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁵⁴ Observasi yang dilakukan peneliti ialah dengan melihat dan mengamati aktivitas masyarakat Desa Sirukem. Beberapa kegiatan observasi yang peneliti lakukan yakni dengan melihat secara langsung kolam-kolam ikan yang telah dikuras airnya, mengelilingi sekitar Desa untuk melihat kondisi geografis dan tata ruang pendirian rumah-rumah warga yang berada di area rawan longsor. Peneliti juga

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, hlm. 228

⁵⁴ Satori dan Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 115.

turut mengamati proses diseminasi informasi melalui media sosial PMI Banjarnegara mengenai beberapa kejadian bencana yang terjadi di Sirukem.

b) Wawancara

Wawancara adalah teknik penelitian yang paling sosiologis dari semua teknik penelitian sosial. Bentuk dari penelitian ini adalah interaksi verbal antara peneliti dengan responden.⁵⁵

Wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan, pertama, dengan wawancara, peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, akan tetapi apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan juga masa mendatang.⁵⁶

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara tersuktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara

⁵⁵ James A. Black dan Dean J. Champion, *Metode & Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 305

⁵⁶ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 68.

dengan menggunakan sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.⁵⁷

c) Dokumen

Dokumen meliputi foto, video, film, memo, surat, diary dan rekaman kasus guna menunjang pengumpulan data penelitian. Selain itu juga dapat dipahami sebagai catatan tertulis yang masih berhubungan dengan suatu peristiwa.⁵⁸ Adapun dokumen yang peneliti maksud yakni catatan tertulis berupa laporan pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan bencana di Desa Sirukem, *press release* yang diterbitkan di media massa dan foto pelaksanaan kegiatan program KBBM di Desa Sirukem.

d) Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik menganalisis data dengan model Miles dan Huberman. Dalam analisis data terdapat 3 hal utama yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung

⁵⁷ Satori dan Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 133

⁵⁸ M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 199.

secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.⁵⁹

2. Penyajian data

Penyajian yang dimaksud merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.⁶⁰

3. Menarik kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan suatu upaya menarik konklusi dari hasil reduksi dan penyajian data.⁶¹ Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Dimana, kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung.⁶² Jadi peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah dikumpulkan, direduksi dan serta sudah disajikan.

⁵⁹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 100

⁶⁰ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 101

⁶¹ M. Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 64

⁶² Ibid., hlm. 65

e) Keabsahan Data

Agar penelitian ini memiliki hasil kepercayaan yang tinggi sesuai apa yang di lapangan, maka peneliti melakukan uji keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁶³ Hal-hal yang dilakukan peneliti dalam triangulasi sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil observasi dan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Sebagai contoh peneliti membandingkan data hasil observasi mengenai kondisi kolam ikan di Desa Sirukem yang telah dikuras dengan data hasil wawancara dengan Bapak Sugeng selaku penasehat Tim Sibat Desa Sirukem yang menyatakan jumlah kolam ikan tersebut sudah jauh berkurang keberadaannya.
2. Membandingkan data hasil wawancara antara satu sumber dengan sumber yang lain. Sebagai contoh data hasil wawancara yang berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan program KBBM dikeluarkan oleh PMI Banjarnegara. Pernyataan mengenai hal tersebut sama-sama dilontarkan oleh Bapak Alwan Rifai selaku Humas PMI Banjarnegara dan Ketua Tim Sibat Desa Sirukem

⁶³ M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 322

3. Membandingkan hasil wawancara dengan analisis dokumentasi yang berkaitan. Sebagai contoh data yang peneliti peroleh melalui hasil wawancara turut dibuktikan dengan arsip dokumentasi yang dapat ditunjukkan oleh narasumber yang bersangkutan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menetapkan sistematika pembahasan menjadi lima empat bab yang terdiri dari beberapa sub-sub. Adapun susunan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: bab ini memaparkan seluruh kajian yang akan diteliti, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini merupakan pengantar untuk memahami langkah pembahasan penelitian yang akan peneliti kaji. Pada bab pertama ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran tentang cara penelitian dilakukan di dalam skripsi ini.

Bab II: berisi tentang gambaran umum Palang Merah Indonesia Kabupaten Banjarnegara dan Desa Sirukem sebagai lokasi penelitian meliputi, letak geografis, sejarah berdiri, visi dan misi, struktur organisasi, sarana dan prasarana, dan latar belakang program kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat yang diusung ke dalam penelitian ini.

Bab III: berisi tentang hasil penelitian dan jawaban atas rumusan masalah yaitu manajemen risiko dalam kesiapsiagaan bencana berbasis

masyarakat yang dilakukan Palang Merah Indonesia Kabupaten Banjarnegara di Desa Sirukem, Kecamatan Kalibening.

Bab IV: merupakan pembahasan yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dari penelitian ini. Kemudian pada bagian akhir penelitian ini memuat tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setiap peristiwa bencana terjadi begitu dekat dengan masyarakat. Mereka mau tidak mau harus menghadapi risiko yang ditimbulkan dari suatu kejadian bencana. Peristiwa bencana sendiri seiring waktu terus mengalami peningkatan jumlah di beberapa wilayah, tidak terkecuali di Desa Sirukem. Diperlukan adanya kegiatan pada tahap pra bencana untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat akan bencana.

Peneliti melihat adanya upaya untuk menjadikan kesadaran bencana menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat melalui serangkaian kegiatan manajemen risiko bencana di Desa Sirukem. Kegiatan manajemen risiko bencana tersebut ditujukan untuk mengatur situasi sebelum timbulnya korban jiwa atau kerugian yang diakibatkan bencana. Manajemen risiko bencana di Desa Sirukem berfokus pada kegiatan situasi terdapat potensi bencana.

Pada situasi terdapat potensi bencana diupayakan kegiatan kesiapsiagaan yang mengarah pada perkiraan-perkiraan tentang kebutuhan yang akan timbul jika terjadi bencana. Kegiatan tersebut diantaranya dilakukannya rapat koordinasi antar lembaga penanggulangan bencana, penyiapan logistik, penyiapan lokasi evakuasi, sosialisasi kepada masyarakat dan simulasi bencana. Kegiatan peringatan dini mengarah pada proses

pengumpulan dan distribusi informasi terhadap gejala bencana sebagai dasar pengambilan keputusan yang dilakukan melalui proses *rapid assessment*.

Sedangkan di Desa Sirukem mitigasi bencana terbagi menjadi dua jenis, mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural dilakukan oleh Pemerintah Desa setempat dengan himbauan terhadap pendirian bangunan baru yang perlu memperhatikan kondisi rawan bencana. Mitigasi non-struktural dilakukan di Desa Sirukem dengan diadakannya pelatihan bencana dan pendirian pos pantau di musim hujan.

Adapun dalam penyelenggaraan manajemen risiko berbasis masyarakat di Desa Sirukem terdapat adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung pertama berjalannya kegiatan antara lain proses komunikasi yang baik antara pihak PMI Banjarnegara dan Pemerintah Desa Sirukem. Kedua sumber daya yang terlibat dalam kegiatan cukup mendukung. Ketiga adanya kerjasama atau keterlibatan pihak seperti BPBD, Dinas Kesehatan menjadikan kegiatan tersebut dapat berjalan.

Faktor penghambat kegiatan sendiri cukup bermacam-macam. Pertama, hambatan tersebut datang dari kondisi geografis Desa Sirukem. Kedua, hambatan komunikasi yang mana lebih mengarah pada penggunaan perangkat yang cukup sulit digunakan secara bebas di Sirukem karena kendala jaringan. Ketiga hambatan datang dari sumber daya itu sendiri yang mana masih kurangnya kesadaran masyarakat Sirukem terhadap bencana, terbatasnya relawan PMI yang memiliki kompetensi spesifik pada program

KBBM, dan dirasa masih kurangnya keterlibatan Pemerintah Desa Sirukem dalam hal penanggulangan bencana.

Secara umum kami dapat mengambil kesimpulan bahwa manajemen risiko bencana berbasis masyarakat yang dilakukan di Desa Sirukem memang sudah cukup baik dilaksanakan. Meskipun kami dapat memahami seluruh bagian kegiatan tidak dapat berjalan sesuai yang diekspektasikan oleh penyelenggara dalam hal ini PMI Banjarnegara. Peneliti juga melihat implementasi Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana tidak sepenuhnya juga dapat berjalan.

Secara khusus, perubahan paradigma penanggulangan bencana dari tindakan responsif ke tindakan preventif tidak lantas membuat pengalokasian dana untuk kegiatan pra bencana menjadi mudah. Di Sirukem, kami mendapati bahwa pendanaan penanggulangan bencana baru akan dikeluarkan apabila terjadi situasi tanggap darurat yang artinya paradigma tindakan responsif ini masih sulit untuk dihindari.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti ingin memberikan saran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam program kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat terutama Palang Merah Indonesia Kabupaten Banjarnegara dan Tim Sibat Desa Sirukem. Saran yang ingin peneliti berikan sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya kejelasan dalam pembuatan kesepakatan perihal pendanaan sebelum berjalannya program KBBM. Sehingga jangan sampai nantinya terjadi ketergantungan terhadap pemberian bantuan dana dalam pelaksanaan program KBBM.
2. Organisasi Tim Sibat perlu melibatkan Pemerintah Desa dalam struktur pimpinan sehingga akan mempermudah jalannya program-program KBBM.
3. Tim Sibat karena merupakan organisasi yang berada di bawah naungan Pemerintah Desa perlu melakukan koordinasi yang lebih apabila melaksanakan kegiatan sehingga tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri. Karena penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab bersama.
4. PMI Banjarnegara bisa saja membuat semacam penghargaan tahunan bagi Tim Sibat yang aktif melaksanakan kegiatan. Ini dilakukan untuk meningkatkan motivasi dalam penanggulangan bencana khususnya di wilayah Banjarnegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana*, Jakarta Timur: Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2018.
- Black, James A. dan Dean J. Champion, *Metode & Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Putra Grafika, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Ghony, M. Junaidi dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hanafi, Mamduh M., *Manajemen Risiko*, cet. Ketujuh, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014).
- Idrus, M., *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Irandi, Deski, *Implementasi Program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Kusumasari, Beavaola, *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*, cet. 1, Yogyakarta: Gava Media, 2014.
- Moeleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Murdiyanto, *Bencana Alam dan Penanggulangannya (Kajian Beberapa Peristiwa Bencana Alam di Kota Jayapura dan Penanggulangannya)*, Yogyakarta: Citra Media, 2014.
- Nurjanah dkk, *Manajemen Bencana*, Bandung: Alfabetta, 2013.
- Palang Merah Indonesia, *Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat*, Jakarta: Palang Merah Indonesia Pusat, 2007.
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabetta, 2013.

Rahman, Amni Zarkasyi, *Kajian Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara*, Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, Vol. 1, No. 1, 2015.

Ramli, Soehatman, *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.

Santoso T. Raharjo, *Manajemen Relawan Pada Organisasi Pelayanan Sosial*, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 4, No. 3 November 2010.

Satori dan Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Susanti, Pranatasari Dyah, dkk., *Analisis Kerentanan Tanah Longsor Sebagai Dasar Mitigasi di Kabupaten Banjarnegara*, Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Vol. 1 No. 1, 2015

Trirahayu, Tiyas, *Implementasi Program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Data Informasi Bencana Indonesia <https://dibi.bnrb.go.id/> diakses pada tanggal 6 Januari 2020

<http://dprd-banjarnegara.go.id/banjarnegara-terkepung-bencana/> diakses tanggal 18 November 2019.

<https://www.suaramerdeka.com/smctak/baca/113510/sanitasi-banjarnegara-terendah-ke-2-di-jateng> diakses pada tanggal 11 November 2019.

Wawancara dengan Bapak Anto selaku Ketua Tim Sibat Desa Sirukem pada tanggal 8 November 2019 pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Alwan Rifa'i selaku Humas PMI Banjarnegara pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 11.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Sugeng selaku Penasehat Tim Sibat Desa Sirukem pada tanggal 8 November 2019 pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Khaerunasikin selaku Sekretaris Desa Sirukem pada tanggal 8 November 2019 pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak M. Badri masyarakat Desa Sirukem pada tanggal 22 November 2019 pukul 14.10 WIB.

Wawancara dengan Bapak Purwanto masyarakat Desa Sirukem pada tanggal 9 Januari 2020 pukul 08.30 WIB.

